Kompas, 17 Juli 2024, hal: 9

Dipicu SRBI, Utang Luar Negeri BI Membengkak

Kepemilikan investor asing di SRBI pada Juni 2024 tercatat telah mencapai Rp 192 triliun atau 27 persen dari total SRBI yang diterbitkan.

JAKARTA, KOMPAS — Utang luar negeri Bank Indonesia pada Mei 2024 meningkat hingga 102 persen secara tahunan. Hal ini tidak lepas dari upaya bank sentral menjaga stabilitas dengan menarik aliran modal asing melalui penerbitan surat utang bertenor pendek atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.

Berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Mei 2024, utang luar negeri (ULN) Bank Indonesia (BI) meningkat 102,8 persen secara tahunan, dari sebelumnya 9,26 miliar dollar AS menjadi 18,78 miliar dollar AS. Dilihat dari jangka waktunya, 54,68 persen dari total utang BI tersebut merupakan utang jangka pendek yang kurang dari setahun.

Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan, ULN BI tersebut terkait dengan kepemilikan investor portofolio asing dalam instrumen pendalaman pasar keuangan. Instrumen tersebut meliputi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

"Bank-bank dan juga investor asing saat ini lebih tertarik pada instrumen SRBI, bukannya SBN (Surat Berharga Negara). Mereka lebih suka tenor jangka pendek karena suku bunganya lebih tinggi dan mengingat kondisi global sekarang yang masih belum menentu. Jadi, kalau mereka mau beli SRBI kecenderungannya akan melepas SBN," kata David saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (16/7/2024).

SRBI merupakan surat berharga dalam bentuk mata uang rupiah sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying* aset berupa SBN milik BI. Artinya, BI berperan layaknya sekuritas dengan mengelola kembali SBN miliknya untuk kemudian diperdagangkan di pasar uang.

Kepemilikan investor asing di SRBI pada Juni 2024, misalnya, tercatat telah mencapai Rp 192 triliun atau 27 persen dari total SRBI yang diterbitkan. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan dengan posisi April 2024 yang masih Rp 75 triliun atau 18 persen.

David menjelaskan, kepemilikan SBN oleh BI terus meningkat hingga kini tercatat Rp 1,410 triliun atau 24,73 persen dari total *outstanding* SBN. Sebelum pandemi Covid-19, kepemilikan SBN oleh BI hanya berkisar 10 persen. Praktik tersebut juga lazim dilakukan di negara lain, seperti Amerika Serikat.

Di sisi lain, ketersediaan SBN yang digunakan oleh BI untuk kebutuhan operasi moneter semakin terbatas untuk menerbitkan SRBI. Jumlah SBN yang tersedia untuk operasi moneter Rp 77 triliun, sedangkan penerbitan SRBI rata-rata Rp 60 triliun per bulan sehingga hanya cukup untuk sebulan ke depan.

"Jadi, artinya, ada dua kemungkinan ke depan, BI akan membeli SBN secara *outright*, tetapi akan dilihat sebagai monetisasi utang pemerintah sehingga kredibilitas BI turun atau BI tidak membeli SBN yang mengakibatkan imbal hasil SBN meningkat dan likuiditas domestik mengetat," ujar David.

Menurut David, penerbitan SRBI memang dapat menarik aliran modal portofolio asing masuk ke pasar keuangan domestik sehingga dapat mencegah stabilitas. Di sisi lain, tingginya tingkat suku bunga SRBI pada gilirannya juga dapat membuat utang BI semakin meningkat dan berujung pada kerugian.

Sebagai perbandingan, tingkat imbal hasil SBN untuk tenor 10 tahun sebesar 6,99 persen. Sementara itu, tingkat imbal hasil SRBI yang ditawarkan per 12 Juli 2024 untuk tenor 6 bulan 7,25-7,35 persen, untuk tenor 9 bulan 7,35-7,44 persen, serta untuk tenor 12 bulan 7,40-7,55 persen.

Gonjang-ganjing rupiah

Terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, berpendapat, tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh SRBI cukup progresif dan menarik minat investor asing. Namun, hal itu juga berisiko membuat para investor asing tidak bertahan lama atau *hit and run* lantaran mereka sensitif dengan tingkat suku bunga.

"Jadi, itu juga yang pada gilirannya membuat gonjang-ganjing nilai tukar rupiah. Jadi, semakin pendek jangka waktunya, logikanya, mereka bisa mengambil peluang suku bunga yang lebih tinggi. Mereka bisa keluar dan otomatis dollar AS keluar sehingga rupiah melemah," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad Wibowo, mengatakan, langkah BI menerbitkan SRBI tidak terlepas dari depresiasi rupiah dalam 1-2 bulan terakhir. "Ada dua pemicunya: faktor fundamental dan psikologi. Yang fundamental, mengingat inflasi relatif terkendali, solusinya lebih banyak terkait neraca perdagangan dan sisa masalah restrukturisasi utang di perbankan. Pemulihannya lebih lama. Yang faktor psikologi, ini terutama terkait spekulasi tentang disiplin fiskal dan kenaikan rasio utang pemerintahan Prabowo. Ini tidak lepas dari pernyataan spekulatif dan rumor beberapa kalangan," tutur Dradjad, yang juga Ketua Dewan Partai Amanat Nasional.

Dradjad berharap keduanya bisa dihentikan demi stabilitas makro ekonomi Indonesia. "Khawatirnya nanti cadangan devisa makin tergerus, BI harus menaikkan utangnya, bahkan mungkin suku bunga acuan, dan efek selanjutnya yang merugikan. Kita perlu meminimumkan faktor psikologis ini," kata Dradjad.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, langkah yang dilakukan BI dengan menerbitkan SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah tidak efektif. "Sebab, hal itu tidak didasarkan faktor fundamental yang bagus," katanya.

Terbukti hingga kini, nilai tukar rupiah tetap lemah dan sulit kembali ke level Rp 15.000-an. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kurs rupiah pada perdagangan Selasa ditutup di level Rp 16.203 per dollar AS, melemah dibandingkan dengan posisi sehari sebelumnya di level Rp 16.174 per dollar AS.

Utang meningkat

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Mei 2024 menunjukkan, ULN Indonesia per Mei 2024 mencapai 407,3 miliar dollar AS atau dalam kurs tengah saat ini setara Rp 6.558 triliun.

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal Ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tercatat 29,8 persen.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, " kata Erwin dalam keterangan resminya, Senin (15/7). (AGP)

AKSI KORPORASI

Menimbang Untung-Rugi Peleburan 7 BUMN Karya

JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan pemerintah merampingkan formasi tujuh badan usaha milik negara di sektor konstruksi menjadi tiga entitas bisa mewujudkan efisiensi dan perbaikan kinerja BUMN Karya. Namun, di balik itu, terdapat risiko perseteran dengan kinerja baik malah akan terbebani rapor merah BUMN lainnya.

Skema penggabungan yang direncanakan Kementerian BUMN mencakup penggabungan, pertama, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Ketiga perusahaan akan bergabung dengan fokus, antara lain, pada proyek pembangunan air dan rel kereta api.

Selanjutnya adalah penggabungan antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Penggabungan kedua entitas diekspektasikan dapat meningkatkan fokus perseteran terhadap proyek pembangunan jalan tol, jalan non-tol, dan bangunan kelembagaan.

Adapun skema ketiga, konsolidasi direncanakan terjadi antara PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Penggabungan kedua perseteran akan berfokus untuk menggarap pelabuhan laut; bandar udara; rekayasa, pengadaan, dan konstruksi; serta bangunan hunian (residensial).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai upaya penggabungan itu akan menimbulkan sinergi dan efisiensi kinerja para BUMN Karya. Peleburan ini juga akan mengurangi persaingan di antara BUMN, khususnya terkait lelang proyek.

"Komponen *overhead cost* (biaya produksi) dan *management cost* (biaya manajemen) bisa dihemat," ujarnya dihubungi pada Selasa (16/7/2024).

Pekan lalu, sebelum memulai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan komposisi dari peleburan tujuh perusahaan konstruksi itu tidak mengalami perubahan.

Menurut Erick, Kementerian BUMN telah bersurat ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait *holding* BUMN Karya.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-*review* (ditinjau) oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR," ujarnya, Rabu (10/7) malam.

> ***Penggabungan akan menimbulkan sinergi dan efisiensi kinerja para BUMN Karya. Peleburan ini juga akan mengurangi persaingan di antara BUMN, khususnya terkait lelang proyek.***
> Martin Manurung

Triwulan III-2024

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko pada kesempatan yang sama menyatakan pembentukan *holding* berjalan sesuai rencana. Artinya, Hutama Karya dan Waskita Karya akan lebih dulu dilebur dengan target integrasi rampung pada triwulan III-2024.

Namun, Kementerian BUMN belum dapat memastikan kapan dua skema integrasinya lainnya akan rampung. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak hanya berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN.

Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya Aloysius Kiik Ro menyatakan kesiapan untuk berkonsolidasi dengan Waskita Karya. "Prinsipnya Hutama Karya akan bersinergi, berintegrasi dengan Waskita Karya. Kami siap sesuai dengan kebijakan (pemerintah)," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad menuturkan, saat ini seluruh BUMN Karya masih melakukan evaluasi secara internal, baik dari sisi bisnis maupun teknis. Namun, hingga saat ini, setiap perseroan masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah.

Ganggu reputasi

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, memandang, meski alasan peleburan BUMN Karya cukup dapat dipahami, semestinya peleburan tidak terbagi menjadi tiga entitas. Pasalnya, terdapat risiko *holding* malah akan membebani perusahaan-perusahaan dengan kinerja keuangan positif.

"Ini ibarat menebar virus ke perusahaan yang sehat. BUMN Karya dengan kinerja 'biru' seperti Hutama Karya dan PT PP bisa terseret yang kurang baik," ujarnya.

Skenario peleburan tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan berisiko memiliki dampak negatif bukan hanya dari sisi keuangan, melainkan juga dari reputasi perseroan.

Ia pun menilai akan lebih baik jika fokus usaha BUMN ditentukan berdasarkan wilayah operasional. Mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur masih sangat besar, akan lebih baik jika *subholding* berkantor pusat di daerah operasi. (DIM)

(ii) membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
(iii) mengkonversikan saham dengan warkat (scrip) tersebut menjadi saham tanpa warkat (scripless) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan.
(iv) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
(v) memastikan bahwa seluruh Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki Pemohon berbentuk tanpa warkat (scripless); dan
(vi) menanggung biaya konversi saham.

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela

Setiap Pemohon wajib melengkapi FPTS untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Setiap FPTS yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela.

(i) Para Pemohon dapat mengperoleh FPTS dari BAE dengan mengirimkan permohonan melalui email atau menghubungi BAE pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 / 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Telepon: (021) 29745222
Email: opr@adimitra-jk.co.id

(ii) Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan Formulir Penawaran Tender Sukarela dalam balasan email dari BAE.
(iii) Dokumen asli FPTS yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikirimkan langsung ke kantor BAE.

4. Tata Cara Pengajuan FPTS

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

(i) Pemohon wajib mengajukan permohonan Penawaran Tender Sukarela kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela. Pemohon Penawaran Tender Sukarela dapat mengperoleh FPTS dengan mengirimkan email kepada BAE.
(ii) Pemohon selanjutnya wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon untuk mengirpul instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender Sukarela pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham Pemohon yang telah dilujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" sehingga Saham tersebut tidak dapat diakihkan atau dipindahkan atau dipergangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum mengpurut instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender Sukarela pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
(iii) Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Masa Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara melengkap dan menandatangani FPTS dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Pemegang saham individu
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
- fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham berkewarganegaraan asing.

b. Pemegang saham berbadan hukum
- fotokopi Anggaran Dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi.

c. Bukti pembukaan Saham dalam rangka kepemerdaan dalam Penawaran Tender Sukarela.
d. Dalam hal FPTS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTS dan lampiran-lampirannya.

(iv) Kelengkapan dokumen asli tersebut dapat dikirimkan langsung ke kantor BAE.
(v) Setelah menyerahkan FPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima kelikuterbatan dalam Penawaran Tender Sukarela yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE melalui email.

5. Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Sukarela

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon, yang telah memasukkan permohonan Penawaran Tender Sukarela, dapat membatalkan kekuterbatannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela, melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah diblokir di C-BEST dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pemberitahuan tertulis atas pembatalan tersebut wajib telah diterima paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender Sukarela.

Pemohon yang membatalkan kekuterbatannya dalam Penawaran Tender Sukarela harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi Saham Pemohon dari "Blocked for CA" menjadi "Available".

6. Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Sukarela, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang Sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan melakukan daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang diketujui. Penentuan Pemohon yang diketujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

7. Penjatahan

Dalam hal Saham Perusahaan Sasaran yang ditawarkan untuk dijual melebihi jumlah sebesar 678.590.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu) Saham, maka Shimizu akan melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender Sukarela dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di BEI tanpa pecahan.

Shimizu akan menunjuk akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai kewajaran dan cara penjatahan dan akan menyampaikan laporannya kepada OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal penjatahan berakhir.

8. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 4 Oktober 2024, KSEI akan mengalihkan Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang diketujui dari Rekening Penampungan ke Rekening Efek atas nama Shimizu sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela kepada Pemohon yang diketujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari Pemohon yang diketujui. Perusahaan Efek/Bank Kustodian dan masing-masing Pemohon yang diketujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang diketujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela adalah dalam Rupiah.

9. Biaya transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang diketujui sehubungan Penawaran Tender Sukarela akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang diketujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang diketujui akan menggung biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Sukarela.

10. Pembatalan Penawaran Tender Sukarela

Penawaran Tender Sukarela ini tidak dapat dibatalkan setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diumumkan, kecuali mempperoleh persetujuan OJK.

11. Pelaporan Hasil Penawaran Tender Sukarela

Shimizu akan melaporkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pembayaran.

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk
PT Ina Sekuritas Indonesia
Wisma Indocement Lt. 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 25101125
Faks: (021) 25104002

Tugas utama Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Sukarela atas nama pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas Pemohon yang diketujui; (ii) menerima Saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran Saham kepada KSEI.

2. Konsultan Hukum
ATD Law
Treasury Tower 2F, SCBD, Lot. 28, District 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, DKI Jakarta 12190, Indonesia
Telephone: (021) 30212222

Tugas utama Konsultan Hukum dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk memberikan advis hukum kepada pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela tentang Penawaran Tender Sukarela dan memastikan bahwa Penawaran Tender Sukarela dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Kustodian
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 515 2855
Faks: (021) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk (i) menerima Saham (dalam bentuk scripless) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan; (ii) memberitahukan dalam Pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan; (iii) menerima dana untuk pembayaran Saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk atas nama pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela; dan (iv) setelah menyerahkan pembayaran kepada Pemohon yang diketujui (melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian masing-masing).

4. Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 / 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Telepon: (021) 29745222
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Tugas utama BAE dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk (i) mendistribusikan dan menyediakan FPTS dan salinan Pernyataan Tender Sukarela ini; (ii) menerima FPTS dari Pemohon setelah dikonfirmasi oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian; (iii) memerbitkan bukti tanda terima; (iv) mengecek kesikurtan data yang diterima dari Pemohon; (v) menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Sukarela kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk; (vi) secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi harian dengan KSEI; (vii) secara bersama-sama dengan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk memverifikasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk mempperleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Sukarela dan tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 pada Hari Kerja pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, pemegang saham dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 / 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Telepon: (021) 29745222
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Ina Sekuritas Indonesia
Wisma Indocement Lt. 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 25101125
Faksimile: (021) 25104002
Email: tenderoffer@inasekuritas.com